

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa reformasi sekarang instansi pemerintah semakin dituntut untuk memperlihatkan pencapaian keberhasilan misi pada organisasi. Keberhasilan suatu organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan penguasaan informasi pengetahuan yang seimbang, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, instansi pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun, serta menyampaikan informasi kinerja yang baik dilakukan dengan secara tertulis, periodik, serta melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawabkan secara periodik. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 20 menyatakan bahwa laporan kinerja dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelapor maupun entitas akuntansi. Beberapa pengungkapan ini terdapat dalam dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan

oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya. Data yang penulis peroleh berupa Capaian Sasaran Kegiatan yaitu data dalam Tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan 2019**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI	
		2018	2019
Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi			
1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
1.2	Persentase BUMN/Anak Perusahaan Dengan Skor GCG Baik	-	-
1.3	Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik)	-	-
1.4	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
1.5	Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	Tercapai	Tercapai
Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian			
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	Tercapai	Tercapai
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	Tercapai	Tercapai
2.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	Tercapai	Tercapai
2.4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	Tercapai	Tercapai
2.5	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	-	-
Sasaran Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional			
3.1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	Tidak Tercapai	Tercapai
Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi			
4.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	Tidak Tercapai	Tercapai

Sasaran Program 5: Meningkatkan Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi			
5.1	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	Tercapai	Tercapai
Sasaran Program 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda			
6.1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	Tercapai	Tercapai
6.2	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	-	-
6.3	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 3	Tercapai	Tidak Tercapai
6.4	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas Level 2	-	-
Sasaran Program 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda			
7.1	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	Tercapai	Tercapai
7.2	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	-	-
7.3	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
7.4	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 2	Tercapai	Tercapai
Sasaran Program Dukungan Pengawasan : Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama			
8.1	Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Tidak Tercapai	Tercapai

Sumber : *bpkp.go.id (Laporan Kinerja tahun 2018 dan 2019), 2023.*

Adapun perubahan sasaran kegiatan dalam upaya mencapai Visi, Misi dan Tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020, terdiri dari enam sasaran kegiatan, yaitu:

Tabel 1.2
Sasaran Kegiatan Kinerja

Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional
Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha
Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi
Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU
Sasaran Kegiatan 6	Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas

Sumber : *bpkp.go.id (Laporan Kinerja tahun 2020), 2023.*

Berdasarkan dari Sasaran Kegiatan atas terdapat capaian sasaran kegiatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Capaian Sasaran Kegiatan
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	TERCAPAI/TIDAKTERCAPAI
		2020
1	Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	
1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Tercapai
1.2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Tercapai
1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Tercapai
1.4	Nilai penyelamatan keuangan Negara	Tidak Tercapai
2	Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	
2.1	Jumlah KP yang diawasi	Tercapai
2.2	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Tidak Tercapai
2.3	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Tercapai
2.4	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Tidak Tercapai
3	Meningkatkan Pengawasan Pemabangunan atas Badan Usaha	

3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	Tercapai
3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	Tercapai
3.3	Jumlah BUMDes yang mampu Menyusun laporan	Tercapai
4	Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Tercapai
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Tercapai
5	Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	
5.1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Tidak Tercapai
5.2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Tidak Tercapai
5.3	Jumlah Pemda kab/kota dengan MRI \geq Level 3	Tidak Tercapai
5.4	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Tercapai
5.5	Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Tercapai
5.6	Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Tercapai
5.7	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	Tercapai
6	Meningkatkan Kualitas Layanan “Ketatausahaan” Unit Kerja	
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Tercapai
6.2	Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Tercapai
6.3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Tercapai
6.4	Persentase Penyusunan RKA tepat Waktu Unit Kerja	Tercapai
6.5	Skor IKPA Unit Kerja	Tercapai
6.6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Tercapai
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP	Tercapai
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Tercapai
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Tercapai

6.10	Maturitas SPP Unit Kerja	Tercapai
6.11	IndeksKualitasnyaLayanan	Tercapai
6.12	IndeksKepuasanLayanan Unit Kerja	Tercapai

Sumber : *bpkp.go.id (Laporan Kinerja tahun 2020),2023.*

Berdasarkan data diatas terlihat terdapat beberapa target sasaran yang masih belum tercapai. Untuk mewujudkan suatu akuntabilitas yang baik terdapat hal-hal yang mempengaruhi antara lain kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern dan sistem pelaporan.

Kompetensi aparatur pemerintah merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang berkerja disuatu organisasi pemerintah yang dapat mengerjakan tugasnya dilandasi keterampilan dan pengetahuan yang memadai sehingga dapat mencapai hasil kerja yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut. Menurut Wibowo (2014:320), "Kompetensi aparatur adalah Suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku dan sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Ahmad Rudi (2019:209), "Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut." Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas dapat mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab agar dapat tercapainya target dan sasaran anggaran tersebut dalam waktu periode tertentu yang mampu memberikan akuntabilitas yang baik. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang kuat di suatu organisasi sehingga akan terbentuk monitoring yang efektif yang mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan merupakan suatu kewajiban untuk mempresentasikan, melaporkan kinerja pegawai dan bukti aktivitas yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memonitor dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat menilai kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah daerah harus dapat menyediakan informasi akuntansi yang akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam instruksi presiden republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikatakan bahwa untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil dari penelitian Angella (2022) menyatakan kompetensi aparatur pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian penelitian Karismawati (2018) studi pada SKPD di Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan bahwa dari hasil penelitian tersebut Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya menurut hasil penelitian Mei (2012) menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan Pengendalian Akuntansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Kompetensi Aparatur, kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat batasan masalah sebagai berikut :

1. Populasi yang terbatas hanya dalam ruang lingkup BPKP Provinsi Sumatera selatan.
2. Hanya memakai empat variabel independen yakni kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern dan sistem pelaporan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Aparatur, kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

a. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah maupun mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dalam menyusun penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan.

b. Bagi Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan agar lebih memperhatikan untuk meningkatkan atau memaksimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan agar berguna untuk meningkatkan pengetahuan hal-hal yang berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan dapat digunakan sebagai referensi dan representatif yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi peneliti selanjutnya.